

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan

Menurut Martani (2015:8), akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement)”.

Menurut Kieso (2011:2) dalam Emil Salim, akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal”.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi Keuangan

Fungsi akuntansi keuangan menurut Dwi Martani (2015:18) yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menghitung suatu laba maupun rugi yang sudah didapat oleh suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan suatu informasi yang dapat berguna untuk manajemen perusahaan.

3. Untuk membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing suatu pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam perusahaan, yaitu baik itu pihak si internal ataupun si eksternal.
4. Untuk mengawasi dan mengendalikan semua macam kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.
5. Dan fungsi yang terakhir untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai suatu targetnya yang sebelumnya sudah ditentukan.

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan menurut Dwi Martani (2015:19) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yg dapat dipercaya mengenai suatu perubahan sumber ekonomi netto suatu perusahaan yg muncul dari suatu kegiatan dalam rangka mendapatkan laba.
2. Untuk memberikan suatu informasi yg terpercaya mengenai Aktiva, Kewajiban dan yang terakhir Modal.
3. Untuk membantu para pemakai dalam memperkirakan suatu potensi perusahaan untuk menghasilkan laba.
4. Untuk Memberikan informasi penting lainnya yang mengenai suatu perubahan sumber-sumber ekonomi & kewajiban yang seperti informasi mengenai aktivitas belanja.
5. Mengungkapkan suatu informasi lain yg berkaitan dengan suatu laporan keuangan yg relevan untuk suatu kebutuhan pemakai laporan keuangan.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Dalam mengambil keputusan yang tepat, diperlukan informasi yang akurat dan lengkap. Dalam hal ini perusahaan akan menyusun suatu laporan keuangan yang dapat menggambarkan seluruh hasil kegiatan perusahaan. Laporan keuangan itu disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha, posisi finansial dan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi finansial kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan

sehingga para investor bisa mempertimbangkan untuk membeli dan menjual saham yang dimilikinya di bursa saham.

Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan-laporan periodik untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, hal itu dibutuhkan guna pengambil keputusan ekonomi yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan.

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2014:7), menyatakan bahwa:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2011:5), pengertian laporan keuangan menyatakan bahwa :

“The principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:5) menyatakan bahwa :

“ Struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan untuk perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan

perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Laporan laba-rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan yang dibuat mempunyai tujuan tertentu. Secara umum laporan keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan terhadap perusahaan, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11) menyatakan bahwa:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Informasi keuangan lainnya”.

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3), adalah :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya.”

Tujuan laporan keuangan menurut Kieso, Waygandt, dan Warfield (2011:7), adalah:

“The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in making decisions in their capacity as capital providers. Information that is decision-useful to investors may also be useful to other users of financial reporting who are not investors.”

Berdasarkan tujuan laporan keuangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.2.3 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015) terdapat beberapa pengguna laporan keuangan dengan kebutuhan informasi yang berbeda yaitu:

- a. “Investor
Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar dividen.

- b. Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.
- c. Pemberi pinjaman
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.
- e. Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau bergantung pada entitas.
- f. Pemerintah
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- g. Masyarakat
Entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitas”.

2.1.2.4 Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Martono dan Agus (2010:52) laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan manfaat antara lain dalam :

1. “Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan pemberian kredit
3. Penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi

5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis penggunaan dana”

Sedangkan menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan adalah:

“Untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya”.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Analisis Laporan Keuangan

Menurut Horne, James, dan Wachowicz Jr. (2012:154) analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Art To change data from financial reports to information useful for decision making”.

Menurut Harahap (2013:190) definisi analisa laporan keuangan menyatakan bahwa :

“Mengurai pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam, yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.”

Menurut Kasmir (2012:66) menyatakan bahwa :

“Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar sehingga akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya”.

Berdasarkan penjelasan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil.

A. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2009:18) tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. *Screening*
Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung kelapangan.
2. *Understanding*
Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya.
3. *Forecasting*
Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
4. *Diagnosis*
Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan atau masalah lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation*
Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan”.

B. Keunggulan Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan seperti yang dijelaskan oleh

Fahmi (2015:52) analisis rasio keuangan memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. “Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistic yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain.
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi.
5. Menstandarisasi ukuran perusahaan.
6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara *periodic* atau *time series*.
7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang”.

C. Kelemahan Analisis Rasio Keuangan

Ada beberapa kelemahan dengan dipergunakannya analisis secara rasio

keuangan yang dijelaskan oleh Fahmi (2015:52) :

1. “Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir.
3. Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah sumber dari laporan keuangan perusahaan.
4. Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat *artificial*. *Artificial* artinya perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio-rasio tersebut”.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Laba

Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh sesuai dengan tujuan utama perusahaan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian laba antara lain:

Menurut Darsono dan Ari Purwanti (2013:177) mengemukakan laba adalah:

“Laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*).”

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai:

“Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.”

Menurut Rudianto (2012:18), laba adalah:

“Selisih positif antara total pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut.”

Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri (2014:130), adalah sebagai berikut:

- “1. Laba Kotor Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba Operasi Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.”

Menurut Kasmir (2012:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

- “ 1. Laba kotor (gross profit) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (net profit) merupakan laba yang telah dikurangi biayabiaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba dibagi menjadi beberapa jenis yaitu laba kotor (gross profit) laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya dan laba bersih (net profit) yaitu laba yang telah dikurangi biaya.

2.1.3.3 Definisi Profitabilitas

Tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba. Berikut ini beberapa pengertian profitabilitas menurut para ahli:

Menurut Sofyan Syahri Harahap (2013:304) profitabilitas adalah:

“Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada melalui kegiatan yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan jumlah cabang”.

Menurut Agus Sartono (2015:122) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden”.

Menurut Fahmi (2013:135) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh.”

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.

2.1.3.4 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas dalam perusahaan dapat menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva ataupun modal yang dapat menciptakan laba tersebut, atau dapat dikatakan profitabilitas dalam kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81) rasio profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu”.

Menurut Fahmi (2015:80) rasio profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan”.

Berdasarkan teori di atas tersebut maka rasio profitabilitas rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap

pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

2.1.3.5 Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

1. "Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri".

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari rasio profitabilitas untuk mengukur dan menilai perkembangan laba selain itu untuk mengetahui produktivitas perusahaan.

2.1.3.6 Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

1. "Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.

4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat dari rasio profitabilitas untuk mengetahui posisi laba, perkembangan laba, besarnya laba dan produktivitas dana dari waktu ke waktu.

2.1.3.7 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81) pengukuran rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebagai berikut:

1. *Profit Margin*

$$\textit{Profit margin} : \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Penjualan}}$$

“Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu”.

2. *Return On Asset (ROA)*

$$\textit{ROA} : \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Total Aset}}$$

“Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu”.

3. *Return On Equity (ROE)*

$$ROE : \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

“*Return On Equity (ROE)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu”.

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset (ROA)* suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.3.8 Return On Assets

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81) *Return On Asset* adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu”.

Pengertian *Return On Assets (ROA)* Menurut Irham Fahmi (2013:137) adalah:

“*ROA* adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi dari aset yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan bagi perusahaan.

2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Definisi *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2013:132) leverage adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan di biayai dengan utang”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:79) *leverage* adalah:

“Penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.

Berdasarkan pendapat di atas, *leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana. Untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. *Leverage* mengukur seberapa besar tingkat pembelanjaan oleh pemilik dibandingkan dengan pembelanjaan yang disediakan oleh kreditur dalam mendanai total aktiva perusahaan. Semakin besar leverage menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiaya investasi perusahaan semakin kecil, atau tingkat penggunaan hutang yang dilakukan perusahaan semakin besar.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), diantaranya:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki”.

Sementara itu, manfaat dari rasio *leverage* ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri”.

2.1.4.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Agus Sartono (2011:120), secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, di antaranya:

1. *Total Debt To Total Capital Asset* (DAR)

Total debt to total capital asset, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar aktiva yang digunakan untuk jaminan utang perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian setiap rupiah dari modal pemilik yang digunakan untuk menjamin utang. Semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan bagi para kreditur, karena jaminan modal pemilik terhadap utang semakin kecil. Pengukuran *Total debt To Capital Asset* sebagai berikut:

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aktiva}$$

2. *Total Debt To Equity Ratio* (DER)

Total debt to equity ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan modal sendiri untuk dijadikan jaminan hutang perusahaan. Pada dasarnya modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas, likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri selain berasal dari dalam perusahaan sendiri dapat pula berasal dari luar perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber interen ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan modal sendiri yang berasal dari sumber eksteren ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Pengukuran *total debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$Total\ Debt\ To\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Modal\ Sendiri}$$

3. *Long Term Debt To Equity Ratio*

Long term debt to equity ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan modal sendiri untuk dijadikan jaminan utang jangka panjang perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa bagian modal pemilik yang menjadi jaminan hutang jangka panjang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk menutup utang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini akan semakin aman bagi kreditur jangka panjang. Pengukuran *Long Term Debt To Equity Ratio* sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{Total\ Utang\ jangka\ panjang}{Total\ Ekuitas}$$

4. *Tangible Assest Debt Coverage*

Tangible asset debt coverage, yaitu rasio yang mengukur besarnya aktiva tetap *tangible* yang digunakan untuk jaminan utang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang setelah melunasi hutang jangka pendek dengan mengesampingkan aktiva tidak berwujud yang dimiliki. Pengukuran *Tangible Assest Debt Coverage* sebagai berikut:

$$\text{Tangible Assest Debt Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)}}{\text{Total Ekuitas} + \text{bunga} + \text{sewa} \frac{\text{angsuran pinjaman}}{1 - \text{pajak}}}$$

5. *Time Interest Earned Ratio*

Times interest earned ratio, yaitu rasio yang mengukur besarnya jaminan keuntungan untuk membayar utang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh laba sebelum bunga dan pajak (laba operasi) dapat berkurang untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini makin baik bagi para kreditur maupun pihak manajemen, karena akan semakin terjamin pembayaran bunga tetap bagi kreditur, atau semakin besar sisa laba yang akan digunakan untuk kebutuhan lain. Pengukuran *Time Interest Earned Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga}}$$

:

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Debt to equity ratio* untuk menghitung leverage. *Debt to equity ratio (DER)* digunakan mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

2.1.4.4 Debt Equity Ratio

Menurut Irham Fahmi (2013:132) menyatakan bahwa:

“*Debt to Equity Ratio* adalah ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”.

Adapun rumus untuk menghitung *debt to equity ratio*:

$$\text{Debt to Equity Ratio} : \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

2.1.5 Corporate Social Responsibility

2.1.5.1 Definisi Corporate Social Responsibility

Menurut Rahmawati (2012:180) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam tanggung jawab operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas keidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Menurut Rusdianto (2013:7) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Konsep dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri

sendiri (*selfish*). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya sambil memperhatikan kepentingan *stakeholder* guna meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.1.5.2 Pengertian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rahmawati (2012:183) menyatakan bahwa:

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Dwi Kartini (2013:56), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah :

“Cara pemberian informasi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan pengungkapan informasi atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan atau masyarakat secara luas.

2.1.5.3 Faktor-Faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya, yaitu:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undangundang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

2.1.5.4 Ruang Lingkup Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup *CSR* yaitu:

1. "*Corporate Philantropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan."

2.1.5.5 Teori Yang Melandasi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Lako (2011:5) terdapat lima teori yang melandasi *Corporate Social Responsibility* yaitu:

1. “Teori *stakeholder*”
Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.
2. Teori legitimasi
Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori kontrak sosial “*social contract*” menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, *CSR* merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.
3. Teori sustainabilitas korporasi
Menurut teori ini, agar bias hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, serta hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori *corporate sustainability*, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.
4. *Political economy*
Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik serta juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan *CSR*.
5. Teori keadilan
Menurut teori ini, dalam system kapitalis pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan

antarpihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program *CSR*.”

2.1.5.6 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumberdaya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)”.

Menurut Rusdianto (2013:13) menyatakan bahwa:

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program *Corporate Social Responsibility* akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi

perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila *Corporate Social Responsibility* mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.”

2.1.5.7 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmental Economies (CERES)* dan (UNEP) pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI terdiri dari G3, G3.1, dan G4. G3 atau yang sering dikenal dengan G 3.0 merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator dan 35 merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. G3.1 merupakan versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung 84 indikator termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumnya pada G3 dengan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih menyempurnakan pedoman GRI. G4 merupakan pedoman terbaru yang memiliki 91 indikator. (www.globalreporting.org).

Indikator-indikator dalam *GRI Standard Disclosure G4*, terdiri dari 3 komponen:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicator*)

3. Indikator Kinerja Sosial (*Social Performance Indicators*), terdiri dari 4 aspek, yaitu:

- Indikator Kinerja Praktek Kerja & Kelayakan Kerja (*Labor Practices & Decent Work Performance Indicator*)
- Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance Indicator*)
- Indikator Kinerja Masyarakat (*Society Performance Indicator*)
- Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk (*Product Responsibility Performance Indicator*).

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Berdasarkan GRI-G4

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan

	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok local di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan nerat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energy diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh air
	EN10	Presentase total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.

	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn res list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori.
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja.

-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
-Asesmen Pemasok	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
Atas Lingkungan	EN33	Dampak lingkungan negative signifikan actual dan potensi dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat pengkrekutan karyawan baru, dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali berkerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Presentase total kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Presentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut gender dan kategori karyawan.

-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indicator keberagaman lainnya.
	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria prakti ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani.
SUB-KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentase karyawan yang dilatih.
-Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
-Praktik Pengamanan	HR7	Presentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.

-Asesmen	HR9	Jumlah total dan presentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
-Asemen Pemasok	HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
Atas Hak Asasi Manusia	HR11	Dampak negatif actual potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Presentase operasi dengan pelibatan masyarakat local, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.
	SO2	Operasi dengan dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local.
-Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan presentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
-Asesmen Pemasok	SO9	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
-Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO10	Dampak negatif actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, di tangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.

SUB-KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Presentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan.
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor, menurut jenis hasil.
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber : *Global Reporting Initiative*

Item-item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tersebut diukur dengan menggunakan CSR Index, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan rumus sebagai berikut :

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan :

CSRI_j : *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j

X_{ij} : 1=jika kriteria diungkapkan; 0= jika kriteria tidak diungkapkan

n_j : Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

2.1.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**2.1.6.1 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.6.2 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Sukrisno Agoes (2013:6) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2012:2) :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.6.3 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Siti Resmi (2014:3), Pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.1.6.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain tetapi juga harus menjadi langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembebanan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.6.5 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6 , beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.6.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (tax saving)
2. Penghindaran pajak (tax avoidance)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.1.6.7 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org dapat dibedakan menjadi dua:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*)

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martini (2014):

1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan *Spirit & Intention of Parliament*,
4. Melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini bersifat legal karena merupakan suatu kegiatan untuk meminimalisasi besarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan teruta melalui perencanaan pajak. Di sisi lain terdapat kegiatan untuk meminimalisasi pembayaran pajak yaitu dengan melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) tetapi hal ini bersifat ilegal dan tidak benarkan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Robert H Anderson dalam Lumbantoruan 2008).

Menurut Dyreng, et Al 2010 *tax avoidance* adalah :

“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”

Menurut Pohan (2013:10) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) *tax avoidance* (penghindaran pajak) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- “1. Menahan diri Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barangn tersebut.
2. Pindah lokasi Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Penghindaran pajak secara yuridis Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*)”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan (legal) yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

2.1.6.8 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2

Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No.	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan
1.	GAAP <i>ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Total Income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
4.	<i>Long-run Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$
5.	<i>ETR Differential</i>	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$
6.	DTAX	$\text{Error term from the following regression: ETR differential} \times \text{Pre – tax book income} = a + b \times \text{control}$
7.	Total BTD	$\text{Pre – tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (-)$
8.	<i>Temporary BTD</i>	$\text{Defered tax expense} / \text{U.S.STR}$
9.	<i>Abnormal Total BTD</i>	$\text{Residual from BTD} / = \beta + \beta$
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	$\text{Disclosed amount post} - \text{FIN48}$

11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indocator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Menurut Dyreng, et al (2010), variabel penghindaran pajak dihitung melalui *CETR* (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung *CETR* menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut :

$$CETR : \frac{\text{cash tax paid}}{\text{net income before tax}}$$

Keterangan :

Pembiayaan Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *CETR* bertujuan untuk mengindikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus *CETR* ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *CETR* ini mengindikasi semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *CETR* juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *CETR* menurut Dyreng, et al (2010) baik digunakan untuk:

“ Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan

Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada.

Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013: 13).

Selanjutnya pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance* akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Chen et.al (2010) menyatakan hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* sebagai berikut:

“Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Dendawijaya (2010:120) mengemukakan bahwa:

“Return On Asset (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak”.

Selain itu hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* dinyatakan oleh Wirna Yola Agusti (2010):

“Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tondakan *tax avoidance*”.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Adapun hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* menurut Suyanto (2012) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak”.

Selain itu hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* menurut Adelina (2012) menyatakan bahwa:

“*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang”.

2.2.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012)

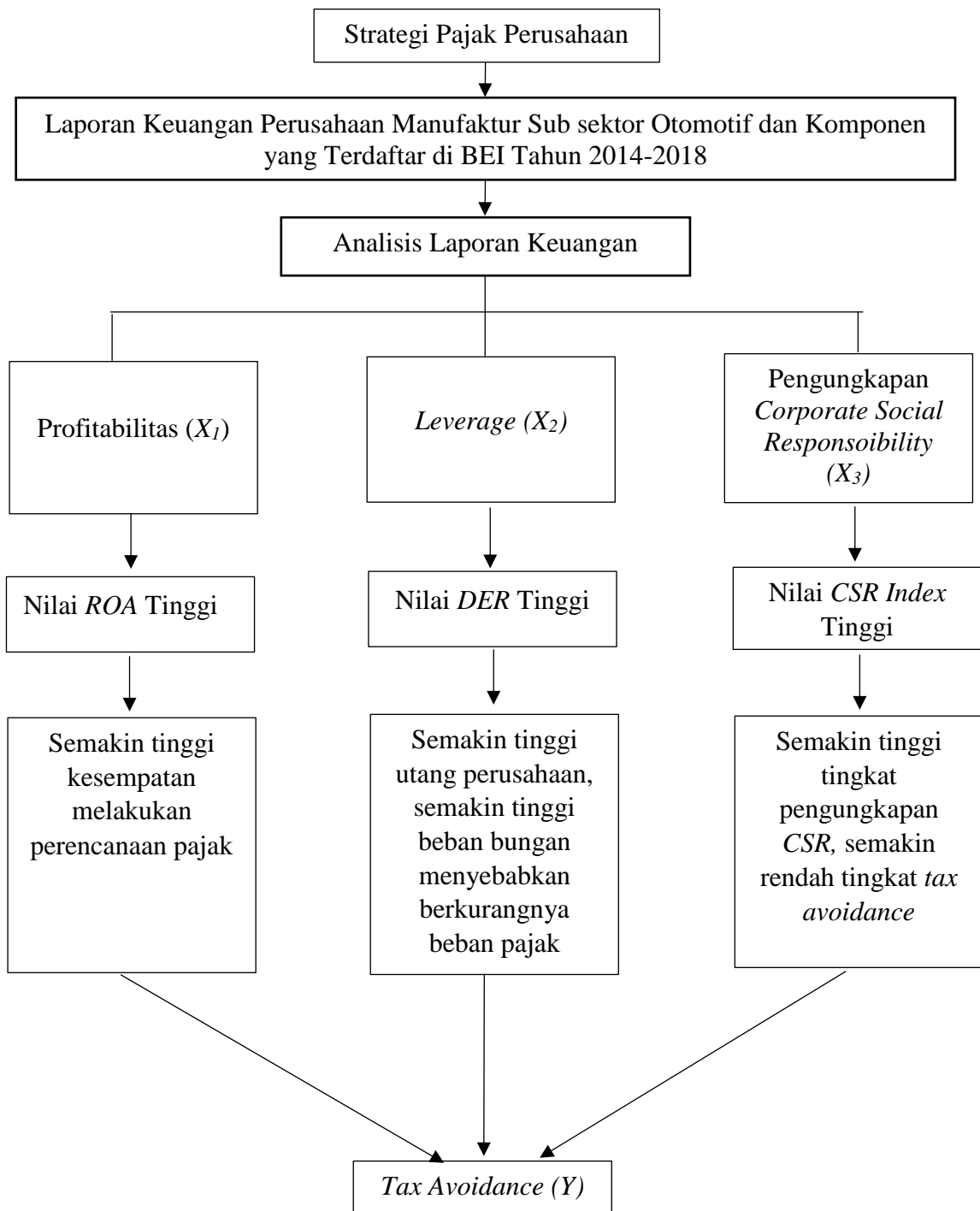
Adapun hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Shintya Dewi Adi Putri (2015) mengemukakan bahwa:

“Semakin tinggi tingkat pengungkapan *CSR* yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan *CSR* suatu perusahaan maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance*”.

Selain itu hubungan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance* dinyatakan oleh Watson (2011):

“Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Perusahaan dengan kegiatan *CSR* yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak”.

Kerangka penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, dan Novia Rahmawati (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Wirna Yola Agusti (2014)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2014)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

			<i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Aprilian Kusuma Ningrum, Eny Suprpti, dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2016)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Gender sebagai Variabel Moderenisasi	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Muadz Rizki Muzzaki dan Darsono (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ..
7.	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Good Corporate Governance</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ..
9.	Mardiah Nursari, Diamonalisa, dan Edy Sukarmo (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

			Kepemilikan Institutional mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	--	--	--

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

H2: Terdapat pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

H3: Terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

H4: Terdapat pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

